



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pontianak, 14 April 2022

Nomor : 50/B/KI-Kalbar/04/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Video Edukatif
Dalam Rangka Peringatan
Hari Keterbukaan Informasi
Nasional Tahun 2022

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Pimpinan Badan Publik
(Daftar Terlampir)
di-
TEMPAT

Dengan hormat,

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berfungsi untuk menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

KI Kalbar berupaya agar iklim keterbukaan informasi di Kalimantan Barat dapat terlaksana dengan baik, akses informasi terbuka luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara dan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkualitas untuk mewujudkan keterbukaan pemerintahan di Kalimantan Barat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KI Kalbar perlu mengoptimalkan peran dan tugas KI Kalbar dengan aktivitas konsolidasi dan koordinasi dengan stakeholder, mitra kerja, dan para pihak terkait.

Dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) memandang perlu dan penting adanya kampanye pelayanan informasi publik dari badan publik dengan tema "*Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2022 untuk Kalimantan Barat yang lebih*

Terbuka dan Informatif”, untuk mengedukasi Badan Publik di Kalimantan Barat tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai Hak Untuk Tahu atas Informasi Publik tersebut. Adapun edukasi dikemas dalam bentuk audio-visual (video) oleh setiap Badan Publik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan Badan Publik di Provinsi Kalimantan Barat berkenan kiranya menyampaikan kampanye pelayanan informasi publik dalam bentuk video.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Wakil Ketua,

LUTFI AURSUL HASAN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

HARI KETERBUKAAN INFORMASI NASIONAL TAHUN 2021

1. NAMA KEGIATAN

Kampanye Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Publik Melalui Video Edukatif

2. TEMA

“Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2022 untuk Kalimantan Barat yang lebih Terbuka dan Informatif”

3. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diundangkan. Di dalam UU KIP tersebut pada Pasal 7 dinyatakan kewajiban badan publik sebagai berikut.

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Dalam konteks Kalimantan Barat, UU KIP tersebut telah dilaksanakan dua tahun sejak diundangkan. Upaya utama yang dilakukannya antara lain adalah setiap kabupaten/kota telah menunjuk PPID, OPD-OPD juga menyusun tim pelayanan informasi publik dengan ditandai SK untuk PPID Pembantu.

Kualitas pelayanan informasi publik Provinsi Kalimantan Barat pun teruji di tingkat nasional. Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi tingkat nasional dan pada tahun 2016 dan 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah meraih peringkat ketujuh nasional untuk keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2018 bahkan telah mencapai peringkat tertinggi nasional dengan kategori pemerintah provinsi yang informatif. Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi tetap berada di zona informatif namun peringkat tiga nasional. Sementara pada tahun 2020, pemerintah provinsi justru berada di zona menuju informatif.

Di sisi lain, upaya badan publik untuk sosialisasi kepada publik terkait pelayanannya juga telah mengalami perkembangan. Dari tahun ke tahun, badan publik di Kalimantan Barat menunjukkan trend yang positif pada jumlah badan publik yang masuk dalam kategori informatif. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum cukup mengerti dengan pelayanan informasi publik dari badan-badan publik. Hal ini tercermin dari masih adanya sengketa informasi publik dan banyaknya masyarakat yang masih mengeluhkan pelayanan informasi.

Selain itu, KI Kalbar juga telah mendapat masukan dari Gubernur Kalimantan Barat bahwa sosialisasi terkait pelayanan informasi publik harus lebih digencarkan lagi.

Untuk itu, pada kesempatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) memandang perlu dan penting adanya kampanye pelayanan informasi publik dari badan publik dengan tema "Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2022 untuk Kalimantan Barat yang lebih Terbuka dan Informatif".

4. TEKNIS PELAKSANAAN

Badan Publik membuat video durasi 1-3 menit terkait kampanye pelayanan informasi publik. Isi video berupa pernyataan dari pimpinan badan publik yang antara lain memuat sebagai berikut:

1. Salam pembuka: Salam Terang Informasi. Sapaan dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2022
2. Isi utama video: gambaran singkat tentang pelayanan informasi publik dan/atau komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik.
3. Salam penutup: dapat berisi ucapan selamat Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2022 dan kalimat "Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2022 untuk Kalimantan Barat yang lebih Terbuka dan Informatif".

Video tersebut dikirim ke KI Kalbar melalui email. Untuk komunikasi terkait kegiatan ini dapat menghubungi Esther Nomor WA 0896 0319 5279.

5. WAKTU KAMPANYE

Video yang disampaikan ke KI Kalbar akan ditayangkan di semua media sosial yang dimiliki oleh KI Kalbar, yaitu FB, IG, Twitter, WA, Youtube, juga media sosial jaringan KI Kalbar, serta media sosial badan publik dan videotron Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, pada rentang waktu 27 April hingga 10 Mei 2022. Untuk itu mohon kesediaan badan-badan publik dapat mengirimkan videonya sebelum tanggal 27 April 2022.

Demikian kerangka acuan kerja ini. Harapan kami semua badan publik semakin semangat untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada publik.

Pontianak, 14 April 2022

KOORDINATOR BIDANG ADVOKASI, SOSIALISASI, DAN EDUKASI
KOMISI INFORMASI PROV. KALBAR

CHATARINA PANCER ISTIYANI

DAFTAR BADAN PUBLIK

1. Gubernur Kalimantan Barat,
2. DPRD Provinsi Kalimantan Barat,
3. Kapolda Kalimantan Barat,
4. Pangdam XII Tanjungpura,
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat,
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak,
7. Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
8. Pemerintah Kota Pontianak,
9. Pemerintah Kota Singkawang,
10. Pemerintah Kabupaten Mempawah,
11. Pemerintah Kabupaten Sambas,
12. Pemerintah Kabupaten Sanggau,
13. Pemerintah Kabupaten Sintang,
14. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,
15. Pemerintah Kabupaten Ketapang,
16. Pemerintah Kabupaten Landak,
17. Pemerintah Kabupaten Bengkayang,
18. Pemerintah Kabupaten Sekadau,
19. Pemerintah Kabupaten Melawi,
20. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,
21. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,
22. DPRD Provinsi Kalimantan Barat,
23. DPRD Kota Pontianak,
24. DPRD Kota Singkawang,
25. DPRD Kabupaten Mempawah,
26. DPRD Kabupaten Sambas,
27. DPRD Kabupaten Sanggau,
28. DPRD Kabupaten Sintang,
29. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu,
30. DPRD Kabupaten Ketapang,
31. DPRD Kabupaten Landak,
32. DPRD Kabupaten Bengkayang,
33. DPRD Kabupaten Sekadau,
34. DPRD Kabupaten Melawi,
35. DPRD Kabupaten Kubu Raya,
36. DPRD Kabupaten Kayong Utara,
37. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat,
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
39. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat,
41. Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat,
42. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat,

43. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
44. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
46. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat,
48. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat,
49. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat,
50. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat,
51. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat,
52. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat,
53. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat,
54. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat,
55. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat,
56. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat,
57. Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat,
58. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat,
59. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat,
60. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat,
61. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat,
62. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat,
63. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat,
64. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,
65. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat,
66. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat,
67. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat,
68. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat,
69. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat,
70. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat,
71. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat,
72. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Barat,
73. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat,
74. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat,
75. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat,
76. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat,
77. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat,
78. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat,
79. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat,
80. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat,
81. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat,
82. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat,
83. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak,
84. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak,
85. Pengadilan Tinggi Pontianak,

86. Pengadilan Agama Pontianak,
87. Pengadilan Agama Sintang,
88. Pengadilan Agama Sanggau,
89. Pengadilan Agama Bengkayang,
90. Pengadilan Agama Mempawah,
91. Pengadilan Agama Sambas,
92. Pengadilan Agama Putusibau,
93. Pengadilan Agama Ketapang,
94. Pengadilan Agama Singkawang,
95. Pengadilan Agama Nanga Pinoh,
96. Pengadilan Agama Sungai Raya,
97. Pengadilan Negeri Pontianak,
98. Pengadilan Negeri Singkawang,
99. Pengadilan Negeri Mempawah,
100. Pengadilan Negeri Sambas,
101. Pengadilan Negeri Bengkayang,
102. Pengadilan Negeri Sanggau,
103. Pengadilan Negeri Sintang,
104. Pengadilan Negeri Putusibau,
105. Pengadilan Negeri Ngabang,
106. Pengadilan Negeri Ketapang.
107. KPU Provinsi Kalimantan Barat,
108. KPU Kota Pontianak,
109. KPU Kota Singkawang,
110. KPU Kabupaten Mempawah,
111. KPU Kabupaten Sambas,
112. KPU Kabupaten Sanggau,
113. KPU Kabupaten Sintang,
114. KPU Kabupaten Kapuas Hulu,
115. KPU Kabupaten Ketapang,
116. KPU Kabupaten Landak,
117. KPU Kabupaten Bengkayang,
118. KPU Kabupaten Sekadau,
119. KPU Kabupaten Melawi,
120. KPU Kabupaten Kubu Raya,
121. KPU Kabupaten Kayong Utara,
122. BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat,
123. BAWASLU Kota Pontianak,
124. BAWASLU Kota Singkawang,
125. BAWASLU Kabupaten Mempawah,
126. BAWASLU Kabupaten Sambas,
127. BAWASLU Kabupaten Sanggau,
128. BAWASLU Kabupaten Sintang,
129. BAWASLU Kabupaten Kapuas Hulu,

130. BAWASLU Kabupaten Ketapang,
131. BAWASLU Kabupaten Landak,
132. BAWASLU Kabupaten Bengkayang,
133. BAWASLU Kabupaten Sekadau,
134. BAWASLU Kabupaten Melawi,
135. BAWASLU Kabupaten Kubu Raya,
136. BAWASLU Kabupaten Kayong Utara,
137. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat,
138. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Kalimantan Barat,
139. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat,
140. Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Kalimantan Barat,
141. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat,
142. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat,
143. Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat,
144. Komisi Perlindungan AIDS Provinsi Kalimantan Barat.